

Judul : Kemenhaj masih urus SDM: sosialisasi haji belum maksimal
Tanggal : Kamis, 27 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 10

Kemenhaj Masih Urus SDM Sosialisasi Haji Belum Maksimal

SUMBER: IG OFFICIAL



Alimudin Kolatlana

ANGGOTA Komisi VIII DPR Alimudin Kolatlana menilai sosialisasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) belum berjalan optimal. Kemenhaj juga belum memiliki kantor wilayah sendiri yang terpisah dari struktur Kementerian Agama di daerah.

Alimudin mengingatkan, dalam mengelola urusan haji, semua pihak ingin semuanya berjalan *on the track*. "Ini harapan Presiden dan kita semua. Titik tekan saya adalah soal kesiapan sumber daya manusia kita," ucapnya dalam Raker Komisi IV DPR dengan Kemenhaj, kemarin.

Dia menyampaikan pengalamannya saat masa reses ke daerah pemilihan terkait kebijakan haji 2026, termasuk mengenai masa tunggu. Ternyata, Kemenhaj belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh. "Kemenhaj menyampaikan siap untuk tidak populer, tapi sosialisasinya belum dilakukan secara maksimal," tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengusulkan agar Kemenhaj memiliki kantor wilayah sendiri yang terpisah dari struktur Kementerian Agama. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, demi memperkuat layanan dan kon-

sistensi informasi.

"Kita tidak bisa terlalu optimis kalau SDM di daerah masih mengandalkan kementerian atau lembaga lain. Kita harus memastikan dalam waktu dekat Kemenhaj sudah memiliki kanwil," katanya.

Selanjutnya, dia juga menilai perlu ada kejelasan struktur organisasi. Sehingga ASN yang menangani urusan haji memiliki kedudukan yang permanen dan mudah dikenali masyarakat. "Sekaligus kepastian bagi masyarakat agar mereka tahu bahwa seluruh urusan haji berada di bawah kementerian ini, mulai dari kanwil hingga tingkat kabupaten/kota," ucapnya.

Anggota Komisi VIII DPR Surahman Hidayat menambahkan, pihaknya dan juga masyarakat menaruh harapan besar kepada Kemenhaj. Kementerian baru itu harus berkomitmen atas kehadiran negara dalam pelayanan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam Indonesia.

"Kebijakan kuota haji yang lebih adil, transparansi pembagian kloter, serta diplomasi aktif dengan Pemerintah Arab Saudi merupakan terobosan penting Kemenhaj yang patut kita syukuri bersama," ujar Surahman.

Dia mengatakan, Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026/1447 H merupakan haji pertama yang diselenggarakan Kemenhaj setelah resmi dibentuk. Ini akan jadi tonggak sejarah bagi Indonesia sebagai negara dengan jemaah haji terbesar di dunia. Sehingga Kemenhaj dituntut menghadirkan pelayanan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Penyelenggaraan Haji 2026 adalah momentum emas membuktikan kehadiran negara dalam menjamin pelayanan ibadah haji umat Islam Indonesia," ujar politikus PKS itu. ■ PYB